POHON KINERJA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2025

VISI

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

MISI 1

Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing

- Nilai SAKIP -Nilai SPIE

Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi

-Nilai Pelayanan Publik
-Rasio Inovasi Daerah - Indeks Merit

Tujuan Kecamatan

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi

Persentase capaian kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan

Meningkatnya tata kelola Administrasi

Indikator : 1. Peningkatan Nilai AKIP. 2. Capaian Kinerja Program

Meningkatnya Kualiata Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

- Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum

- Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Menigkatnya Kualitas Pelaksanaandan Penyusunan Pelaporan Keuangan

- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Kematangan Inovasi

Meningkatnya kualitas Pelayanan publik

1.persentase pelayanan publik yang dilakukan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

- Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

II. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

Meningkatnya inovasi perangkat daerah

1.pemenuhan kriteria inovasi

terlaksananya inovasi di kecamatan

jumlah inovasi

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

I. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan

1. Sub Kegiatan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari

1. Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik. 2. Angka Kemiskinan ekstrim. 3. Prevalensi stunting (EPPGBM)

Meningkatnya kualitas penataan nagari

Persentase fasilitasi penataan nagari

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari

- jumlah Nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dari Pendayagunaan Aset Desa

Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakat

Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari

- Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas
- Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

I. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

II. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Persentase Konflik yang diselesaikan

Meningkatnya penyelesaian permasalahan trantibum yang di fasilitasi

Persentase permasalahan trantibum yang di fasilitasi

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibun

- Jumlah permasalahan Trantibun yang diselesaikan

E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan DesaPenyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di kecamatan

CAMAT

ARIFIND ARNAS, S.STP, M.M
NIP. 19920415 201206 1 00 1